



## **KEBIJAKAN EKONOMI AMERIKA SERIKAT DALAM SKEMA PROTEKSIONISME TARIF**

Ziyad Falahi\*

Abstrak

*Peringatan mengenai peningkatan tarif resiprokal sebagaimana yang disampaikan Presiden Donald Trump telah direalisasikan. Tulisan ini bertujuan menganalisis lebih lanjut kebijakan ekonomi Amerika Serikat dalam rangka memmanifestasikan proteksionisme berdasarkan pada tarif yang diberlakukan kepada banyak negara. AS terlihat secara resmi keluar dari pakem neoliberalisme dengan merestriksi produk untuk meningkatkan pendapatan negara. Tidak hanya variabel kepemimpinan Donald Trump, namun tren global adalah faktor yang menjelaskan bagaimana banyak negara juga dihadapkan pada proteksionisme sebagai opsi. Problem keuangan negara memicu pertumbuhan ekonomi beberapa tahun belakangan kurang bisa bersandar pada sektor privat. Prinsip market led development dan Laissez Faire mengingatkan AS pada krisis subprime mortgage. Oleh karena itu, melalui fungsi pengawasan Komisi I diharapkan mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mengembangkan diplomasi dalam rangka mengatasi tarif, serta mempertimbangkan moneter AS yang dapat berimplikasi pada hilirisasi perekonomian nasional.*

### **Pendahuluan**

Kebijakan tarif Presiden Donald Trump telah diperkenalkan ke seluruh dunia pada *Liberation Day* 5 April 2025, setelah beberapa bulan menjadi perbincangan global. Sebuah kebijakan yang meningkatkan tarif di atas sepuluh persen kepada banyak negara, dan 245 persen khususnya kepada China. Kebijakan ini diharapkan mampu menstimulus pendapatan Amerika Serikat (AS). Negara tertentu hanya membayar pada pemerintah federal AS sebesar sepuluh persen, sementara sebagian lainnya dibebankan sangat tinggi, seperti Thailand 36 persen, Indonesia 34 persen, serta Malaysia dan Brunei 24 persen. Tarif universal tersebut tidak meliputi sebelas negara yang diputuskan tidak terkena tarif Trump, seperti Burkina Faso, Kuba Meksiko, Korea Utara, Belarus, Kanada Meksiko, Palau, Rusia, Seychelles, serta Vatikan dan Somalia (Maharani, 2025).

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyampaikan Indonesia berkomitmen untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi saling menguntungkan. Pemberian tarif balasan akan mengeskalasi situasi sehingga merugikan masyarakat serta negara yang terlibat. Lewat pertemuan langsung dengan US Trade Representative (USTR)

\*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemen, Badan Keahlian DPR RI. Email: ziyad.falahi@dpr.go.id.

dan Department of Commerce di Washington, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kedua negara telah menyepakati format kerja sama yang akan dibahas tuntas dalam waktu 60 hari ke depan. Pernyataan bersama para Menteri Ekonomi ASEAN juga menegaskan komitmennya untuk mengedepankan dialog konstruktif dalam menyikapi ketegangan dagang terbaru. Kebijakan tarif Trump harus dipahami dan direspons dengan tepat. Tulisan ini akan mengelaborasi sejauh mana dampak dari Tarif Trump dalam kerangka kebijakan ekonomi global yang telah dicanangkan AS.

### **Neoliberal dalam Proteksionisme Tarif**

Neoliberal merupakan fundamentalisme pasar yang telah mengakar dalam perekonomian AS. Dengan tambahan sentuhan Trump, neoliberal bukan lagi mengajak negara pada *bailout* semata melainkan mendayagunakan tarif untuk menatakelola perdagangan bebas. Neoliberal sejatinya tidak fanatik dengan menolak campur tangan negara melalui penguatan bea dan cukai. Perdagangan bebas yang dikemas dalam kerangka neoliberal mencoba untuk menghilangkan proteksionisme, dengan senantiasa percaya pada hukum *supply and demand*. Namun proteksionisme AS merupakan strategi dalam mengedepankan finansialisasi moneter. Dengan kata lain, Tarif Trump dapat dimaknai sebagai cara untuk memperkuat mata uang dolar. Kurangnya cadangan devisa dan likuiditas AS bukan dalam rangka memaksimalkan independensi *superpower* meskipun dengan slogan *Make America Great Again*. Namun *superpower* tersebut dikaitkan dengan jejaring perekonomian negara yang disebut David Harvey (2005) sebagai genealogi logika kontemporer perekonomian AS.

Dengan rezim perdagangan *Trade in Relation Intellectual Property right* (TRIPs), petrodolar AS mampu tersebar ke seluruh dunia melalui perusahaan multinasional yang berproduksi di negara berkembang tanpa bisa melakukan imitasi. Tidak lagi digunakannya produksi sentralistik (*assembly line*) dengan mengadopsi mata rantai perekonomian *post fordis*, AS tampil imperialistik dengan rantai persebaran barang yang sekaligus menambah jumlah dolar di banyak negara. Suku bunga Federal Reserve secara langsung mampu mengkuantifikasi kekayaan AS yang terdistribusi sehingga negara penerima investasi akan senantiasa adaptif dengan kebijakan moneter AS (Hardt & Negri, 2005).

Setelah puluhan tahun, kini AS tidak menjadi satu-satunya produsen teknologi dunia. Disaingi oleh kehadiran China, AS tidak lagi sepenuhnya mengontrol rantai pasokan ekonomi. Komunisme China dengan keberhasilannya melalui China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), BRICS, dan Belt and Road Initiative (BRI) akhirnya mengakui pasar bebas jauh lebih penting daripada pajak tarif (Subramanian, 2011). Dalam teorinya berjudul "Manias, Panics and Crashes", Charles Kindleberger (2005) menjelaskan bahwa fase perekonomian mania bukanlah fase yang positif. Walaupun terlihat sebagai sebuah kemajuan *boost, bubble* dapat terjadi dalam sektor finansial sehingga ekspektasi pasar terlalu berlebihan. Justru dalam perekonomian yang mengalami resesi, fase panik tidak

terlalu berdampak secara holistik. Hal tersebut tercermin dalam penurunan secara fluktuasi bursa saham dunia seperti Nasdaq, Nikkei dan NYSE akhir-akhir ini yang belum masuk ke dalam situasi moneter “Crash”. Fase mania telah diperingatkan dengan kebijakan Tarif Trump sehingga para pelaku pasar tidak panik, dan telah memiliki anjang-ancang.

Regulator *US Customs and Border Protection* (Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS) merinci barang-barang seperti ponsel pintar, laptop, *hard drive*, monitor layar datar, beberapa chip, hingga mesin yang memproduksi semikonduktor akan memenuhi syarat untuk pengecualian tarif impor. Hal ini mengindikasikan ponsel pintar, laptop, dan lain-lain tidak akan dibebankan pajak 245 persen yang diberlakukan untuk China ataupun tarif dasar sepuluh persen dari negara lain. Namun, produk-produk elektronik di atas masih akan dikenakan tarif dua puluh persen yang sudah diberlakukan per awal tahun 2025. AS tidak terlalu risau walau tarif impor China 145 persen menyebabkan saham Apple, Meta, dan lainnya berguguran. Kebijakan Trump terkontemporer setidaknya membawa angin segar untuk Apple, Samsung, hingga Nvidia. Oleh karena itu, perubahan tersebut menjadi langkah untuk membantu para produsen elektronik untuk tetap menjaga harga barang elektronik, khususnya yang tidak diproduksi di AS menjadi lebih rendah (CBC.ac, 2025).

### **Kebijakan Resiprokal *Subprime Mortgage***

Kemakmuran negara adalah representasi kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya kemakmuran rakyat adalah representasi kemakmuran negara. Adagium tersebut merupakan cara pandang merkantilisme. Sedangkan Liberalisme mengingatkan tentang bahayanya monopoli negara terhadap pasar. Negara salah berperan sebagai institusi yang berkebutuhan finansial sehingga perlu memiliki aset dan emas sebanyak-banyaknya. Peran negara yang terbaik adalah menjamin kelangsungan pasar dimana rakyat mampu mengakses kebutuhan.

Beberapa pandangan yang menganggap Trump adalah neomerkantilis dengan sendirinya mampu dikritisi. Berbeda dengan neomerkantilis yang mengangkut kekayaan secara besar-besaran, Trump percaya tentang kenaikan harga properti sebagai indikator kesehatan finansial. Melalui rencana pengembangan properti AS di Gaza dan sekitarnya, tampak manajemen risiko yang mampu memberi kepercayaan pada investasi jangka panjang. Risiko politik ketidakpastian keamanan tidak menjadi kekhawatiran dalam menjamin kelangsungan properti AS (Wu, 2011). Oleh karena itulah, ASEAN tidak lagi menjadi determinan walaupun masuk ke dalam proyeksi abad pasifik. Negara yang dengan mudah tunduk pada defisit neraca perdagangan sehingga berpotensi menopang GDP besar untuk China diuji oleh tarif resiprokal. Namun, menteri perekonomian negara-negara ASEAN menyatakan tidak akan mengambil tindakan balasan terhadap kebijakan tarif tinggi.

Dalam level analisis ideosinkretik, Trump tampak sebagai seorang yang konsisten dengan nasionalisme. Berulang kali Trump menunjukkan hegemoni AS dalam suasana perang

dagang dengan negara lain. Trump berasal dari Partai Republik bukanlah sosok militer. Trump adalah seorang dengan latar belakang pengusaha yang dapat berperan demokrat dengan sempat memberi kelonggaran tarif China dibawah manuver resiprokal China yang terlihat lebih mengincar pasar Eropa, sehingga level analisis negara menunjukkan bahwa AS tidak tunduk pada pilihan subjektif pemimpin semata. Dalam ruang lingkup level analisis internasional, independensi AS dalam mengukur perekonomian tidak dapat disamakan dengan doktrin Truman membendung komunis. Secara leluasa, AS mampu membuat skala prioritas, sehingga performa asertivitas Trump terhadap China dianggap lebih dari Joe Biden.

Kebijakan resiprokal AS mencoba mengembangkan sektor keuangan telah menjadikan *subprime mortgage* tidak lagi traumatis. Dengan karakter tegas, Trump meyakini bahwa *post-american* sebagaimana yang diungkapkan Fareed Zakaria (2008) adalah bencana jangka pendek *subprime mortgage*. Investasi kini dapat ditransaksikan dalam bentuk yang akumulatif meski belum dapat diserap oleh daya beli. Real Estate di Palestina sebagai contoh merupakan basis keuangan yang bersifat strategik, bukan untuk dikonsumsi secara langsung sebagaimana *subprime mortgage*. Dengan kata lain, internasionalisasi subprime mortgage merupakan ekspansi perekonomian dengan memanfaatkan sisi jangka panjang spasial ruang.

Dalam logika *spatio temporal fix*, logika kedaulatan negara AS dianggap telah jenuh dengan pembangunan fisik (Biagi, 2020). Rencana tata ruang AS dalam membangun properti berjalan datar dengan rata-rata 6.212% dari Maret 1971 sampai September 2024. AS justru mencetak produksi besar-besaran minyak pasca krisis 2008 oleh perusahaan multinasional AS sehingga semakin memperkuat rezim petrodolar tidak hanya di Timur Tengah.

## Penutup

Kebijakan Tarif AS berimplikasi secara luas dalam perekonomian di era pasar bebas. Donald Trump meyakini bahwa kapita selekta tarif merupakan bentuk internasionalisasi ekspansionis, bukan sebuah refleksi dari sebuah kebijakan defensif. Proteksionisme AS yang mendorong China melirik pasar Eropa bukan neoliberal Konsensus Washington yang dianggap sudah tidak relevan. Nasionalisme AS masih tetap memandang persebaran dolar sebagai aset yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter negara lain.

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk mengkaji mengenai prospek kerja sama alternatif sebagai bagian negosiasi tarif. Sama seperti negara ASEAN lainnya, membangun kerja sama secara strategis dengan AS dapat dilakukan pula melalui diplomasi *second track*. Diplomasi parlemen menunjukkan sikap konsisten dengan mendayung di antara dua karang, sehingga tetap memprioritaskan multilateralisme. Melihat implikasi dari peringatan tarif resiprokal AS mampu menjadi indikator perdagangan global, Indonesia perlu membina hubungan baik dengan AS walaupun terdapat status sebagai BRICs yang intensif menghadang dominasi dolar.

## Referensi

- Biagi, F. (2020). *Henry levebre critical theory of space*. Palgrave Macmilian.
- Hardt, M., & Negri, A. (2005). *Empire*. Harvard University Press.
- Harvey, D. (2005). *Imperialisme baru*. Resist Book.
- Kindleberger, C. P. (2005). *Manias, panics and crashes*. Palgrave Macmilian.
- Maharani, I. (2025, April 12). AS-China saling balas tarif impor, ini sejarah perang dagang. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/12/143000165/as-china-saling-balas-naikkan-tarif-impor-ini-sejarah-perang-dagang-2>
- Reuters, T. (2025, April 13). Amid trade war ambiguity, Trump signals he will place further tariffs on Chinese tech. *CBC*. <https://www.cbc.ca/news/world/trump-tariffs-exempted-electronics-1.7509266>
- Santi, N. (2025, April 10). ASEAN prihatin atas tarif sepihak AS. *SHID*. <https://sinarharapan.id/asean-prihatin-atas-tarif-sepihak-as/>
- Subramanian, A. (2011). The inevitable superpower: Why China dominance is a sure thing. *Foreign Affair*, 90(5), 67–90.
- Wu, G. (2011). China: Dilemma of scientific development. *Asian Survey*, 51(1), 78–103.
- Zakaria, F. (2008). *The post American world*. Penguin Books.

